

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PT. PLN UNIT PELAKSANA
PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BANDA ACEH**

S K R I P S I

Karya Akhir Guna Memenuhi Sebahagian Dari Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH

**RINDI KAUTSAR
NPM. 18100021
PRODI. AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)
BANDA ACEH
2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari dalam mengikuti perkuliahan sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebahagian persyaratan memperoleh gelas Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa segala yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Banta Karollah, SE, M.S.M, selaku Plt Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh.
2. Ibu Intan Novia Astuti, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh
3. Ibu Eliana, SE, M.Si , selaku Dosen Pembimbing Satu saya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing serta memberikan saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Indra Kesuma, SE, M.Si, Ak, CA , selaku Dosen Pembimbing Dua saya yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing serta memberikan saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen STIES Banda Aceh, yang tanpa pamrih dan sepenuh hati telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada kami selama mengikuti perkuliahan dan bimbingan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar dan administrasi Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sabang Banda Aceh atas segala ilmu pengetahuan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk orangtua saya beserta keluarga besar yang sangat saya cintai dan hormati yang telah memberikan dorongan, doa, dan semangat yang berarti kepada peneliti dalam menjalani pendidikan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Semua teman-teman yang secara aktif telah memberikan dukungan dan bantuan seharai-hari selama perkuliahan dan bimbingan skripsi di kampus STIES Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Akuntansi.

Banda Aceh, Januari 2022

Peneliti,

RINDI KAUTSAR

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang dan Permasalahan	1
1.2. Masalah Penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Skop Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1. Teori <i>Stewardship</i>	9
2.2. Transparansi Pengelolaan Keuangan	9
2.2.1. Pengertian Transparansi	9
2.2.2. Karakteristik Transparansi	11
2.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi.....	12
2.2.4. Indikator Transparansi	13
2.3. Penyajian Laporan Keuangan	13
2.3.1. Pengertian Penyajian Laporan Keuangan	13
2.3.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	15
2.3.3. Komponen Laporan Keuangan	16
2.3.4. Tujuan Pelaporan Keuangan	17
2.3.5. Indikator Penyajian Laporan Keuangan.....	18
2.4. Aksesibilitas Laporan Keuangan	19
2.4.1. Pengertian Aksesibilitas	19
2.4.2. Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan.....	20
2.5. Penelitian Terdahulu	21
2.6 Kerangka Konseptual	22
2.7 Hipotesis Penelitian.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Populasi dan Sampel.....	26
3.1.1. Populasi	26
3.1.2. Sampel.....	26
3.2 Metode Penarikan Sampel.....	27
3.3 Metode Pengumpulan Data	27
3.4 Operasional Variabel	29
3.5 Metode Analisis Data	32
3.5.1. Uji Validitas	32
3.5.2. Uji Reabilitas	32
3.6. Uji Asumsi Klasik.....	33

3.6.1. Uji Normalitas Data	33
3.6.2. Uji Multikolinearitas.....	34
3.6.3. Uji Heteroskedastisitas	34
3.7. Uji Hipotesis	35
3.7.1. Analisis Regresi Berganda.....	35
3.7.2. Uji Parsial (Uji T).....	35
3.7.3. Uji Simultan (Uji F).....	35
3.7.4. Koefisien Determinasi (R^2)	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1. Analisis Data Penelitian.....	37
4.1.2. Karakteristik Responden	47
4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reabilitas	39
4.2.1 Uji Validitas	39
4.2.1 Uji Reabilitas	40
4.3 Pengujian Asumsi Klasik	41
4.3.1 Pengujian Normalitas.....	41
4.3.2 Pengujian Multikolinearitas	42
4.3.3 Pengujian Heteroskedastisitas.....	43
4.4 Pengujian Hipotesis.....	44
4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda	44
4.4.2 Uji Simultan (Uji F)	46
4.4.3 Uji Parsial (Uji t).....	46
4.4.4 Koefisien Determinasi (R^2).....	48
4.5.Pembaha	
4.5.1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan	49
4.5.2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	51
DAFTAR PERPUSTAKAAN	53
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel III.1 Operasional Variabel	30
Tabel IV.1 Karakteristik Responden	38
Tabel IV.2 Hasil Uji Validitas	39
Tabel IV.3 Hasil Uji Reabilitas.....	41
Tabel IV.4 Hasil Uji Multikolinearitas	43
Tabel IV.5 Hasil Uji Analisa Regresi	45
Tabel IV.6 Hasil Uji Uji Simultan (Uji F)	46
Tabel IV.7 Hasil Uji Parsial (Uji t)	47
Tabel IV.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	48

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar II.1 Kerangka Konseptual	23
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas	42
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	44

ABSTRAK

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA PT. PLN UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BANDA ACEH

Nama : Rindi Kautsar

NPM : 18100021

Pembimbing 1 : Eliana, SE, M.Si

Pembimbing 2 : Indra Kesuma, SE, M.Si, Ak, CA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh. Permasalahan yang timbul apakah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan?. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan secara simultan maupun secara parsial.

Metode penelitian yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang hubungan antar variable independen terhadap variable dependen.

Sampel penelitian yang ditetapkan sebanyak 57 responden. Variabel-variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan skala Likert, dan data diperoleh dengan menyebarluaskan kuisioner ke responden. Analisis data dengan bantuan *Software SPSS for Windows*. Untuk menguji setiap item pada setiap variable telah dilakukan uji validitas dan uji reabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas keuangan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap transparansi pengelolaan keuangan dengan nilai probabilitas ini dibawah 0,05 (0,000 < 0,05). Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan dengan diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1.677 sedangkan nilai t_{hitung} sebesar 2.321 ($2.321 > 1.677$) pada taraf signifikansi sebesar 0,000 atau 0.000 < 0.05. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan dengan diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1.677 sedangkan nilai t_{hitung} sebesar 1.695 ($1.695 > 1.677$) pada taraf signifikansi sebesar 0,047 atau 0.047 < 0.05.

Kata Kunci: *Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Transparansi Pengelolaan Keuangan*

vii

viii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Untuk melihat efisiensi, efektivitas dan kinerja pelaksanaan pemerintahan, maka penyajian/pelaporan laporan keuangan sangat diperlukan dikalangan lembangan sektor publik. Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara atau daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penyajian laporan keuangan oleh pemerintah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selain itu, informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah harus transparansi dan akuntabilitas (Apriliani dkk, 2015). salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Menurut Chrystiana (2017), transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Menurut Annisaningrum (2010:2), transparansi berarti memberikan informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Informasi keuangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan merupakan ciri pengelolaan negara yang baik dan bertanggung jawab yang kita kenal dengan istilah *good governance*. Lemahnya sistem pengelolaan keuangan negara dan hukum yang ada menjadi pemicu tindakan penyalahgunaan kekayaan dan keuangan negara serta maraknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) (Siahaan dkk, 2018). Menurut Apriliani dkk (2015), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah menjalankan amanat rakyat.

Penerapan transparansi di organisasi sektor publik diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak internal (managemen) dan pihak eksternal (masyarakat). Silver (2005) dalam Siahaan dkk (2018) mengatakan bahwa

para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut organisasi untuk lebih transparan. Selanjutnya, transparansi sebagai suatu kejujuran dan ketepatan yang tidak hanya dalam jumlah yang disampaikan atau dirilis oleh organisasi, tapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya.

Upaya transparansi ini bisa dilakukan melalui pelaksanaan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi laporan keuangan juga harus dipublikasikan agar masyarakat selaku stakeholder mengetahui dan bisa melakukan analisa yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi kinerja (Mahmudi, 2010). Sari (2017) juga berpendapat salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif.

Objek pada penelitian ini adalah PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh. Saat ini PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh belum memiliki website yang dapat diakses. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menambahkan satu ayat dalam pasal 116 Ayat (4a) pasal 116 berbunyi, untuk memenuhi asas tansparansi, kepala satuan kerja wajib menginformasikan laporan keuangan daerah kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi adalah penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas. Penyajian laporan keuangan daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diperbarui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan

daerah, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond, (2002) dalam Siahaan dkk (2018) pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1, alinea 49 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Penelitian mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah yang dipengaruhi oleh penyajian laporan keuangan daerah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Apriliani dkk (2015) dan Chrystiana (2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh antara penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Artinya, jika penyajian laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, maka akan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah.

Selain melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, juga diperlukan reformasi dalam aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas

(accessibility) laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif juga tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006) dalam Varida (2018). Sehingga pemerintah selain menyajikan laporan keuangan juga harus memberikan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara memberikan fasilitas kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Aksesibilitas laporan keuangan akan mempengaruhi transparansi laporan keuangan daerah. Hal ini dapat terjadi karena pengelolaan keuangan daerah yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial, oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan transparansi yang baik (Apip & Maesaroh, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) dan Rahma, dkk (2020) yang menemukan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah mampu mempengaruhi transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas**

Laporan Keuangan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan pada PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh”.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan penulis, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama (simultan) terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh?
2. Apakah terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh?
3. Apakah terdapat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama (simultan) terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan pada PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam memimplementasikan teori akuntansi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan empiris bagi pengembangan ilmu akuntansi.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan maupun praktisi ekonomi dalam menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan referensi khususnya bidang akuntansi.

1.5. Skop Penelitian

Penelitian ini mengambil skop pada program studi akuntansi kosentrasi Akuntansi Sektor Publik dengan unit analisis menguji pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banda Aceh.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

- Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan*. Jurnal Ekonomi.
- Apip, Muhammad & Maesaroh, Fitri. (2016). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*. 4(1), 28-39
- Apriliani, N.K.A., et al. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, dan aksesibilitas terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klungkung). *e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Jurusan Akuntansi Program S1. (Volume 3 No 1 Tahun 2015).
- Bachrein, S. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan kebijakan pembangunan perdesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 8 No.2, Juni 2010: 133-149
- Chrystiana, Ema Tietien. (2017). *Pengaruh Penyajian laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan AKuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironangan, Kecamatan Gatak, Kabupaten SUkaharjo*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Hehanussa, S.J. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota ambon. *Jurnal UNISSULA*.
- Indria, Ayu Nabilah. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transaparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalayan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 11, November 2016 , 3
- Kusuma, M. (2012). Pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. *Cahaya Aktiva* Vol.02 No.02, September 2012.
- Lapananda, Y. (2016). *Hukum pengelolaan keuangan desa*. Buku I. Jakarta: Rmbooks.

- Lewier, C.N. dan Kurniawan, C.H. (2016). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten. *Jurnal Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan*. Jakarta: Airlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Mustofa, A.I. (2012). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*.
- Nurlaili. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksebilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Studi Pada SKPD Kabupaten Bengkalis. *JOM Fekon*, 3(1):1-16.
- Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- Purba, Elsridayani Efri. (2020). *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Pengendalian Internal, Komitmen Manajemen, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Simalungun)*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Rahma., Maryadi & Waluyo, Sugeng Hery. (2020). Pengaruh Penyajian, Aksesinilitas Laporan Keuangan Bappeda terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pinrang. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*. 1(1), 106-117
- Ridha, M. A dan Basuki, H. dan 2012. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi 15* Banjarmasin.
- Salomi, J.Hehanussa. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan AKuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference in Business, Accounting and Management*. 2(1), 82-90.
- Sari, Widya Embun. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya

Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jom Fekon.* 4(1), 571-586

Setiawan, M. W., dan et al. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kab.Buleleng). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*

Siahaan, Hasian Gunung., Syaikhul, Falah., & Bharanti, Elitha. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Komitmen Pimpinan terhadap Transaparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD di Kabupaten Keerom. *Jurnal Akuntansi , Audit & Aset.* 1(1), 27-41

Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas.* Malang: Setara

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Alfabeta: BandungPress

Sukhemi. (2012). Pengaruh aksesibilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen.*

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang Pertanggungjawaban ADD.

Wahida, N. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara.* Skripsi. Makassar. Universitas Hasanuddin Makassar

Widodo, J. (2011). *Membangun birokrasi berbasis kinerja.* Malang: Bayumedia Publishing.